

Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa FKIP UNRI

Razali¹, Sri Erlinda², Jumili Arianto³

¹²³Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau, Indonesia
E-mail: razali1099@student.unri.ac.id¹, sri.erlinda@lecturer.unri.ac.id², jumili.arianto@lecturer.unri.ac.id³

Abstract

Citizenship education is part of formal education in Indonesia, as well as political education in the context of forming good citizens in carrying out the life of the nation and state. One of the most important points of learning citizenship education is to form good citizens and have political knowledge, especially students as the generation of hope for the nation in influencing the country's political process. This study aimed to see the effect of the Civics course on the political participation of FKIP UNRI students. The research method used in this research is a correlational quantitative research design. Data collection techniques were carried out by field studies (surveys) by distributing questionnaires through the Google form. The data analysis technique used correlation test analysis. The results of this study showed that there was an influence of civics education (PKn) courses on the political participation of FKIP UNRI students based on the results of the correlation test, namely 48.8% in the sufficient category. Its mean that there were 51.2% of other factors that might influence student political participation FKIP UNRI.

Keywords : *Citizenship Education, Civic Course, Political Participation*

1. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah sarana pencerdasan dan sudah menjadi hak fundamental yang dimiliki oleh setiap manusia. Pendidikan merupakan upaya dalam memanusiakan manusia, mengembangkan kepribadian secara menyeluruh dengan mengubah perilaku dan sikap dari yang bersifat negatif ke positif, dari yang destruktif ke konstruktif, dari berakhlak buruk ke akhlak mulia, termasuk mempertahankan karakter baik yang disandangnya tanpa adanya diskriminan (Zaini, 2013). Artinya, setiap manusia berhak untuk mendapatkan pendidikan. Hal tersebut juga tertuang dalam amanat konstitusi bangsa Indonesia pada pasal 31 UUD 1945 (amandemen) bahwa, "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan". Oleh karena itu, negara bertanggung jawab penuh atas pendidikan setiap warganya dengan mengusahakan dan mengupayakan sebuah sistem

pendidikan yang terbungkus dalam sebuah kurikulum pendidikan formal yang berjenjang agar terwujudnya warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab untuk membangun bangsa kedepannya.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian dari pendidikan formal yang ada di Indonesia, sekaligus pendidikan politik dalam rangka membentuk warga negara yang baik dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, terdapat dua fungsi pendidikan, yakni sebagai pelaksanaan pengajaran politik dan indoktrinasi pemahaman atau ideologi politik negara. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik merupakan salah satu bentuk upaya mensosialisasikan kehidupan politik dengan teori pendidikan. Menurut Hemafitria & Hadi Rianto (2015) dalam penelitiannya, membedakan kedua tipe pengajaran pembelajaran pendidikan kewarganegaraan menjadi dua, yaitu pembelajaran pendidikan kewarganegaraan secara utuh atau civic education dan Indoktrinasi Politik. Pendidikan kewarganegaraan sebagai civic training merupakan bagian dari pendidikan politik yang menekankan bagaimana seorang warga negara yang baik berpartisipasi dalam kehidupan politik bangsanya. Sedangkan yang dimaksud dengan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan melalui indoktrinasi Politik merupakan pendidikan politik yang lebih menekankan belajar ideologi politik tertentu yang dimaksudkan untuk merasionalisasi dan menjastifikasi rezim tertentu.

Salah satu poin terpenting dari pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam aspek psikomotorik ialah untuk membentuk warga negara yang baik, yang ikut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kehidupan bernegara. Dalam negara demokrasi, peran dan partisipasi warga negara menjadi aktor penting untuk melaksanakan sistem pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan negara (Nurdin, 2019). Sebagai bagian dari warga negara, mahasiswa yang merupakan generasi muda dan berintelektual seharusnya telah memiliki pemahaman politik yang didapat dari proses pendidikan politik yang diberikan negara dalam bentuk pembelajaran pendidikan kewarganegaraan.

Menurut Nurwardhani (2018) menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah suatu rangkaian kegiatan yang melibatkan peran serta masyarakat baik langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, partisipasi merupakan penentu berjalannya sistem tersebut. Sehingga setiap warga negara dituntut ikut berpartisipasi dalam proses politik negara termasuk mahasiswa. Mahasiswa sebagai warga negara yang berada pada jenjang pendidikan tinggi idealnya memiliki tingkat partisipasi politik tinggi, karena warga negara yang berpendidikan tinggi dinilai lebih sadar dan aktif dalam berpartisipasi politik (Wulandari & Umi Dayanti, 2019). Mahasiswa yang diharapkan sebagai *agent of change*, *social control*, *iron stock*, dan *moral force* kadangkala dituntut perannya dalam proses politik. Karena peran dan tanggung jawab ideologis mahasiswa sebagai pewaris utama perjuangan bangsa, yang diharapkan menjadi ahli dalam bidang-bidang tertentu agar dapat berperan aktif dalam proses pembangunan dan kemajuan bangsa kedepannya.

Secara historis, sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia mahasiswa sudah berperan aktif dalam ikut berpartisipasi dalam proses politik. Sejarah mencatat beberapa peristiwa besar yang terjadi dinegeri ini tidak lepas dari peran mahasiswa, melalui gerakan-gerakan pencerdasan dan aksi demonstrasi seperti gerakan Tritura pada masa orde lama, juga gerakan bersejarah reformasi tahun 1998 menjadi bukti keterlibatan mahasiswa dalam setiap proses politik dinegeri ini. Hingga saat ini, eksistensi partisipasi politik dari mahasiswa masih terjaga walaupun tidak sebesar gerakan-gerakan sebelumnya. Berdasarkan pengamatan peneliti di lingkungan FKIP Universitas Riau, mahasiswa FKIP Universitas Riau juga ikut terlibat dalam berpartisipasi politik. Hal ini diperjelas berdasarkan data yang didapatkan dari BEM FKIP Universitas Riau, bahwa mahasiswa FKIP Universitas Riau berpartisipasi dalam berbagai kegiatan politik. Secara spesifik Howard menegaskan, apabila dikehendaki tercapainya luaran pendidikan sebagai warga negara yang baik dan memiliki integritas dalam berpartisipasi politik, maka kompetensi kewarganegaraan yang terdiri atas pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*) perlu diintegrasikan ke dalam praktik pendidikan secara terencana dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi (Stokamer, 2013). Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah riset terkait pembelajaran diperguruan tinggi, yakni pelaksanaan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam rangka membentuk warga negara yang baik dan memiliki *political knowledge* khususnya mahasiswa sebagai generasi harapan bangsa dalam mempengaruhi proses politik negara.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pengaruh pembelajaran PKn terhadap partisipasi politik mahasiswa FKIP UNRI termasuk ke dalam jenis penelitian kuantitatif desain korelasional. Penelitian kuantitatif korelasional adalah penelitian dengan menggunakan metode statistik yang mengukur pengaruh antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini variabel yang diukur pengaruhnya ialah pembelajaran PKn terhadap partisipasi politik mahasiswa FKIP UNRI. Dimana variabel bebas adalah pembelajaran PKn sedangkan variabel terikat ialah partisipasi politik mahasiswa FKIP UNRI.

Penelitian dilaksanakan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Populasi dalam penelitian ialah mahasiswa FKIP Universitas Riau. Adapun teknik pemilihan sampel dilakukan secara acak, dengan jumlah sampel sebanyak 97 mahasiswa aktif angkatan 2017-2019 dari 5 jurusan berbeda yakni jurusan PMIPA, PIPS, JIP, Bahasa dan Sastra, serta Jurusan Pendidikan Olahraga.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan melakukan studi lapangan (*survey*) terhadap mahasiswa yang telah mendapatkan mata kuliah PKn. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner yang disertai dengan alasan memilih jawaban yang disebar melalui *google form*. Adapun jenis data dalam penelitian terdiri atas data kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif didapatkan dari hasil jawaban kuesioner pertanyaan tertutup, sedangkan data kualitatif didapatkan berupa alasan dari pilihan jawaban pada kuesioner. Kuesioner disusun berdasarkan skala likert skor 1-3. Berikut ini merupakan kriteria skala likert untuk pilihan jawaban pertanyaan dalam kuesioner menurut Martini, *et al* (2018).

Tabel 1. Tingkatan Skala Likert Kuesioner

Pernyataan	Positif (+)	Negatif (-)
Setuju (S)	3	1
Kurang Setuju (KS)	2	2
Tidak Setuju (TS)	1	3

Analisis data dilakukan dengan melakukan pengujian prasyarat analisis serta uji korelasi. Perhitungan prasyarat analisis serta uji korelasi koefisien korelasi pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS 22. Untuk melihat derajat hubungan antara variabel X dan variabel Y atau

mengidentifikasi tinggi rendahnya koefisien korelasi dapat digunakan tabel kriteria pedoman uji koefisien korelasi, yaitu sebagai berikut.

Tabel 2. Interpretasi Koefisien Korelasi

Koefisien Korelasi	Kriteria
$0,80 < x \leq 1,00$	Sangat Tinggi
$0,60 < x \leq 0,80$	Tinggi
$0,40 < x \leq 0,60$	Cukup
$0,20 < x \leq 0,40$	Rendah
$0,00 < x \leq 0,20$	Sangat Rendah

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Deskriptif

Penelitian ini berlokasi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa FKIP Universitas Riau yang diambil dari lima jurusan yaitu jurusan PMIPA, PIPS, JIP, Bahasa dan Sastra, dan Pendidikan Olahraga dengan jumlah sampel 97 mahasiswa dari angkatan 2017 sampai 2019. Dengan catatan telah menyelesaikan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan (PKn). Berikut ini merupakan rekapitulasi data angket instrumen pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Tabel 3. Rekapitulasi data angket instrumen pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

No	Sub Indikator	Jawaban Alternatif					
		S		KS		TS	
		F	%	F	%	F	%
1.	Memahami Hak Dasar Asasi Manusia	94	96,90%	3	3,10%	0	0%
2.	Memahami Definisi Masyarakat madani	78	80,41%	19	19,59%	0	0%
3.	Implementasi Prinsip Demokrasi dengan Berpikir Kritis	85	87,62%	12	12,38%	0	0%
4.	Implementasi Demokrasi dalam Kehidupan Bernegara	84	86,60%	13	13,40%	0	0%
5.	Implementasi Bentuk Pemerintahan Demokrasi	85	87,62%	12	12,38%	0	0%
6.	Kelebihan Sistem Demokrasi dalam Pergantian Pemimpin	91	93,81%	6	6,19%	0	0%

7.	Demokrasi dalam Penegakan Keadilan	72	74,22%	23	23,71%	2	2,07%
8.	Memahami Hakikat Negara	91	93,81%	6	6,19%	0	0%
9.	Memahami Hakikat Konstitusi	82	84,53%	15	15,47%	0	0%
10.	Memahami Hakikat Otonomi Daerah	94	96,90%	2	2,07%	1	1,03%
11.	Memahami Hakikat Wawasan Nusantara	91	93,81%	6	6,19%	0	0%
12.	Memahami Hakikat Kekuatan Nasional	91	93,81%	5	5,16%	1	1,03%
13.	Memahami Hakikat Strategi Nasional	82	84,53%	12	12,38%	3	3,09%
Jumlah		1.120	1.154,57%	134	138,21%	7	7,22%
Rata-rata		86,154	88,81%	10,308	10,63%	0,538	0,56%

Berdasarkan rekapitulasi pengaruh mata kuliah pendidikan kewarganegaraan (PKn) terhadap partisipasi politik mahasiswa FKIP UNRI, diketahui bahwa persentase responden yang menjawab setuju sebesar 88,81%, kurang setuju 10,63%, dan tidak setuju sebesar 0,56%. Karena rata-rata pemahaman responden pada mata kuliah PKn dominan pada kategori setuju (88,81%), maka kategori pemahaman responden terhadap pembelajaran PKn termasuk pada kategori sangat kuat. Dimana jawaban responden yang tertinggi terdapat pada indikator memahami hak dasar asasi manusia dan hakikat otonomi daerah, yaitu sebesar 96,90% yang menunjukkan bahwa mahasiswa sangat memahami poin pembelajaran hak dasar asasi manusia dan hakikat otonomi daerah. Sebaliknya, indikator dengan nilai terendah berada pada indikator demokrasi dalam penegakan keadilan, yaitu sebesar 74,22%. Hal ini berarti bahwa mahasiswa FKIP UNRI masih menilai kurangnya penegakan keadilan di negara yang bersistem demokrasi.

Sedangkan rekapitulasi data angket instrumen partisipasi politik mahasiswa FKIP UNRI ialah sebagai berikut.

Tabel 4. Rekapitulasi data angket instrumen partisipasi politik mahasiswa FKIP UNRI

No	Sub Indikator	Jawaban Alternatif					
		S		KS		TS	
		F	P%	F	P%	F	P%

1.	Ikut <i>Voting</i> atau Pemberian Suara	91	93,81%	5	5,16%	1	1,03%
2.	Menghadiri Diskusi Politik dan Rapat Umum	61	62,89%	30	30,92%	6	6,19%
3.	Membicarakan Masalah Politik	59	60,82%	29	29,90%	9	9,28%
4.	Mengikuti Perkembangan Politik Melalui Media Massa	73	75,26%	20	20,62%	4	4,12%
5.	Mengikuti Kegiatan-kegiatan Politik	53	54,64%	36	37,12%	8	8,24%
6.	Menjadi Anggota Kelompok Kepentingan	46	47,42%	33	34,02%	18	18,56%
7.	Mempertahankan Pendapat	63	64,94%	29	29,90%	5	5,16%
8.	Memberikan Penilaian Terhadap Politik	78	80,41%	16	15,47%	4	4,12%
9.	Kemampuan Meyakinkan Orang Lain	65	67,01%	28	28,87%	4	4,12%
10.	Orang-Orang Yang Apatis	13	13,40%	25	25,78%	59	60,82%
Jumlah		602	620,60%	251	257,76%	118	121,64%
Rata-rata		60,2	62,060%	25,1	25,776%	11,8	12,164%

Berdasarkan tabel instrumen partisipasi politik mahasiswa FKIP UNRI diatas menunjukkan bahwa rekapitulasi pengaruh mata kuliah pendidikan kewarganegaraan (PKn) terhadap partisipasi politik mahasiswa FKIP UNRI dengan jawaban responden yaitu yang menjawab setuju sebesar 62,06%, yang menjawab kurang setuju 25,776%, dan yang menjawab tidak setuju sebesar 12,164%. Karena rata-rata jawaban responden terhadap partisipasi politik dominan pada kategori setuju (62,06%), maka kategori pemahaman responden terhadap partisipasi politik termasuk pada kategori sangat kuat. Dimana jawaban responden yang tertinggi terdapat pada indikator ikut voting atau pemberian suara, yaitu sebesar 93,81 yang menunjukkan bahwa mahasiswa lebih aktif dalam kegiatan voting. Sebaliknya, indikator dengan nilai terendah berada pada indikator mahasiswa berperan sebagai orang-orang apatis dalam partisipasi politik, yaitu sebesar 13,40%. Hal ini berarti bahwa mahasiswa memiliki kesadaran dalam kegiatan partisipasi politik di lingkungan FKIP UNRI.

3.2 Pengujian Prasyarat Analisis

Pengujian prasyarat analisis dilakukan sebelum analisis data. Prasyarat yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas dan uji linearitas.

3.2.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas dalam penelitian ini, mendapatkan hasil *asympt. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,024. Hasil tersebut kurang dari nilai sig. 0,05 yang dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Apabila uji normalitas memberikan hasil bahwa yang digunakan dalam penelitian ini cenderung tidak normal maka dapat menggunakan asumsi *Central Limit Theorem* yaitu jika jumlah data penelitian cukup banyak ($n > 30$) maka asumsi normalitas dapat diabaikan (Gujarati, 2003).

3.2.2 Uji Linearitas

Tujuan uji linearitas adalah untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas (X) yaitu pembelajaran PKn mempunyai hubungan atau tidak dengan variabel terikat (Y) yaitu partisipasi politik mahasiswa FKIP UNRI. Jika tidak linear maka analisis regresi tidak dapat dilanjutkan. Kriteria pengujian linearitas adalah apabila harga F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} ($F_{hitung} < F_{tabel}$) pada taraf signifikansi 10%, maka hubungan variabel bebas (X) yaitu pembelajaran PKn dengan variabel terikat (Y) yaitu partisipasi politik mahasiswa FKIP UNRI dinyatakan linear. Setelah dilakukan perhitungan dengan program SPSS *Statistics 22*, hasil uji linearitas disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5. Ringkasan Hasil Uji Linearitas

No	Variabel		F_{hitung}	F_{tabel}	Nilai Sig.	Kesimpulan
	Bebas	Terikat				
1	X (Mata Kuliah PKn)	Y (Partisipasi Politik Mahasiswa FKIP UNRI)	1,248	2,76	0,285	Linear

(Sumber : Data Olahan 2021)

Hasil uji linearitas untuk mata kuliah PKn (X) dengan partisipasi politik mahasiswa FKIP UNRI (Y) pada tabel diatas menunjukkan bahwa F_{hitung} sebesar 1,248 dan nilai F_{tabel} sebesar 2,76 dengan nilai signifikansi sebesar 0,285. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ ($1,248 < 2,76$) yang berarti hubungan antara X dan Y adalah linear.

3.3 Pengujian Hipotesis

Adapun pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis yaitu teknik analisis regresi sederhana dan teknik analisis korelasi. Teknik analisis regresi sederhana digunakan untuk menguji hipotesis penelitian, sedangkan analisis korelasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara variabel mata kuliah PKn (X) dengan partisipasi politik mahasiswa FKIP UNRI (Y). Pengujian hipotesis menggunakan bantuan program komputer SPSS *Statistics 22*.

Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis

Mod.*	r_{xy}	r^2_{xy}	t_{hit}	t_{tabel}	r_{tabel}	Koef	Kons	Ket.
X	0,488	0,238	5,449	1,66105	0,1680	0,865	-7,464	Positif dan signifikan

(Sumber : Data Olahan 2021)

Dari tabel hasil pengujian hipotesis, maka persamaan regresi dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut :

$$Y = 0,865X - 7,464$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,865. Hal tersebut berarti apabila mata kuliah PKn (X) naik satu satuan maka partisipasi politik mahasiswa FKIP UNRI (Y) naik sebesar 0,865 satuan.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan koefisien korelasi (r) sebesar 0,488 dengan koefisien determinan (r^2) sebesar 0,238. Koefisien determinasi menunjukkan ketepatan garis regresi. Garis regresi digunakan untuk menjelaskan proporsi dari partisipasi politik mahasiswa FKIP UNRI (Y) yang diterangkan oleh mata kuliah PKn (X). Hal ini berarti bahwa mata kuliah PKn berpengaruh sebesar 48,8% terhadap partisipasi politik mahasiswa FKIP UNRI dan terdapat 51,2% faktor lain yang kemungkinan berpengaruh terhadap partisipasi politik mahasiswa FKIP UNRI. Dari hasil tersebut juga didapatkan hasil bahwa pengaruh yang ditunjukkan antara mata kuliah PKn dengan partisipasi politik mahasiswa FKIP UNRI berinterpetasi cukup.

Dalam penelitian juga dilakukan pengujian signifikan dengan uji t yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran PKn (X) terhadap partisipasi politik mahasiswa FKIP UNRI (Y). Hipotesis yang diuji terdapat pengaruh pembelajaran PKn terhadap partisipasi politik mahasiswa FKIP UNRI. Berdasarkan pengujian signifikansi dengan uji t dapat diperoleh harga t_{hitung} yang dihasilkan sebesar 5,449 sedangkan harga t_{tabel} dengan taraf signifikansi 10% sebesar 1,66105.

Apabila t_{hit} sama dengan atau lebih besar dari t_{tab} dengan taraf signifikansi 10% maka variabel tersebut berpengaruh signifikan dan hipotesis dapat diterima. Sebaliknya, apabila t_{hitun} lebih kecil dari t_{tab} maka variabel tersebut tidak signifikan dan hipotesis ditolak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa t_{hitu} lebih besar dari t_{tabel} ($5,449 > 1,66105$), sehingga hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh pembelajaran PKn terhadap partisipasi politik mahasiswa FKIP UNRI dapat diterima.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa pengaruh pembelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn) terhadap partisipasi politik mahasiswa FKIP UNRI berdasarkan hasil pengujian korelasi yaitu sebesar 48,8% dengan kategori cukup, artinya terdapat 51,2% faktor lain yang kemungkinan berpengaruh terhadap partisipasi politik mahasiswa FKIP UNRI. Sehingga dapat dikatakan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn) memiliki pengaruh terhadap partisipasi politik mahasiswa FKIP UNRI. Penelitian ini memberikan informasi bahwa masih terdapat 51,2% variabel-variabel lain yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik mahasiswa FKIP UNRI yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hendaknya dalam penelitian selanjutnya, peneliti dapat meneliti faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi partisipasi politik mahasiswa FKIP UNRI misalnya seperti faktor pengalaman organisasi.

REFERENSI

- Gujarati, D. N. (2003). *Basic Econometrics*. Mc-Graw Hill. New york.
- Hemafitria & Rianto, H. (2015). Pembelajaran PKn Sebagai Pendidikan Politik Pemilih Pemula. *Jurnal Edukasi*. 13(2), 175-189.
- Martini, E., Azwar, I., & Pringga, F. S. (2018). Pengaruh Pendidikan Politik terhadap Kesadaran Partisipasi Pemilih Pemula di SMK PGRI 1 Cimahi Jawa Barat. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. 2(1), 271-283.
- Nurdin, P. H. (2019). Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik oleh Partai Politik. *Jurnal Jambura Law Review*, 1(2), 144-166.

Nurwardhani, P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*. 10(1), 57-62.

Stokamer, S. (2013). Pedagogical Catalysts Of Civic Competence : The Development of a Critical Epistemological Model for Community-Based Learning. *Journal of Higher Education Outreach and Engagement*. 17(1), 113-122.

Wulandari, N. A. T. & Dayanti, U. (2019). Hubungan Pengetahuan Kewarganegaraan dengan Partisipasi Politik Mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. 4(2), 361 - 367.

Zaini, A. H. F. (2013). *Pilar-pilar Pendidikan Karakter Islami*. Bandung. Gunung Djati Press.

